



Penguatan Institusi Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sedyo Makmur Paska Izin Usaha Tebang Kayu di Semanu, Kabupaten Gunungkidul

**Rijal Ramdani^{1*}, Gatot Supangkat Sumidjo², Eko Priyo Purnomo³, Kevin Arya Pranaja⁴,
Bagaskoro Nur Abu Yogar⁵**

^{1,4,5}Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

³Doktor Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Indonesia

²Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
Email: ¹rijalramdani@umy.ac.id

Abstract

The Community Forestry (HKm) policy gives the Sedyo Makmur Forest Farmer Group (KTH) the right to manage 115 hectares of state forest with the principles of sustainability and community welfare. The programme allows the KTH to plant various trees, such as mango, sengon, cashew and soursop as well as intercropping and logging after 15 years. The Community Forest Utilisation Business Permit (IUP HKm) was granted in 2007 until 2042, with an additional Timber Forest Product Utilisation Business Permit (IUP HHK HKm) in 2019-2024. However, after the expiry of the IUP HHK HKm, the KTH faced several obstacles, including weak managerial and administrative systems, difficulties in establishing cooperation with external parties, and the inability to reforest the 115 Ha of forest that had been cut down. To overcome these problems, two main activities were designed, namely (1) education and mentoring for KTH in organisational governance, administration, and strengthening cooperation networks with various parties, and (2) nursery training and provision of various types of seeds to support reforestation efforts. It is hoped that this programme can strengthen the capacity of KTH in sustainable forest management and improve the welfare of group members.

Keywords: Community Forests, Forest Farmer Groups, Reforestation, Forest Governance, Community Welfare.

Abstrak

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) memberikan hak kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Sedyo Makmur untuk mengelola 115 Ha hutan negara dengan prinsip kelestarian dan kesejahteraan masyarakat. Program ini memungkinkan KTH menanam berbagai pohon, seperti mangga, sengon, mete, dan sirsak serta melakukan tumpang sari dan penebangan kayu setelah 15 tahun. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUP HKm) diberikan pada 2007 hingga 2042, dengan tambahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUP HHK HKm) pada 2019–2024. Namun, setelah berakhirnya IUP HHK HKm, KTH menghadapi beberapa kendala, termasuk lemahnya sistem manajerial dan administrasi, kesulitan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, serta ketidakmampuan mereboisasi 115 Ha hutan yang telah ditebang. Untuk mengatasi permasalahan ini, dirancang dua kegiatan utama, yaitu (1) edukasi dan pendampingan bagi KTH dalam tata kelola organisasi, administrasi, dan penguatan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak, serta (2) pelatihan pembibitan dan pemberian berbagai jenis bibit guna mendukung upaya reboisasi. Diharapkan program ini dapat memperkuat kapasitas KTH dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok.

Kata Kunci: Kelompok Tani Hutan, Reboisasi, Tata Kelola Hutan, Kesejahteraan Masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Permasalahan Tata Kelola Hutan di Indonesia

Permasalahan dalam pemanfaatan hutan di Indonesia bersumber dari berbagai macam faktor; faktor pertama yaitu dari sisi ekonomi, dorongan untuk meningkatkan pendapatan negara yang mendorong pemerintah untuk memberikan hak pemanfaatan hutan kepada industri (Agus et al., 2024; Rahayu et al., 2018; Wisnu Rubiyanto et al., 2023). Faktor kedua datang dari sisi sosial dan budaya, munculnya fenomena para peladang yang berpindah, dimana masyarakat melakukan pembakaran hutan yang kemudian bermukim sementara sebelum berpindah lagi saat kesuburan tanah menurun (Hendriyantore, 2018; Lawrence et al., 2010). Faktor ketiga yaitu adanya alasan kebutuhan hidup (*the struggle of life*), yaitu fenomena praktik deforestasi (*illegal logging*) oleh masyarakat karena ketergantungan mereka terhadap hasil hutan demi memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup (Hendriyantore, 2018; Lawrence et al., 2010).

Fenomena deforestasi yang terjadi menimbulkan kerugian yang signifikan, dengan estimasi kerugian negara mencapai 2 miliar rupiah dalam bentuk pajak yang tidak terbayar, dimana lebih dari 50% disebabkan oleh aktivitas ilegal (Austin et al., 2019; Gopal et al., 2023; Kiely et al., 2021). Maka dari itu, baik penebangan legal maupun ilegal menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius (Hifume et al., 2024; Kusin et al., 2020). Terlebih lagi, industri kehutanan di Indonesia kerap diwarnai oleh praktik korupsi, penghindaran pajak, dan kebakaran hutan, yang menyebabkan kerugian ekonomi dan ekologis (Arifandy & Sihaloho, 2016; Martapani et al., 2021).

Solusi terhadap permasalahan tersebut menuntut adanya kebijakan yang dapat mendistribusikan sumber daya hutan secara adil kepada komunitas lokal, seraya memastikan keberlanjutan ekologis hutan (Arba & Sudiarto, 2023; Sari et al., 2024). Pada tingkatan komunitas, pentingnya untuk memperkuat kapasitas institusi lokal agar mampu mengelola hutan secara lestari dan adaptif terhadap dinamika lingkungan yang terjadi (Alule et al., 2023; Sourokou & Vodouhe, 2024). Institusi lokal yang adaptif terhadap kondisi sosial dan ekologis akan lebih mampu menjaga kelestarian hutan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik dan konteks budaya masing-masing institusi lokal sangat penting dalam mendesain intervensi berbasis masyarakat (Annisa & Zunariyah, 2018; Talumepa, 2020).

Salah satu contoh nyata dari permasalahan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat dilihat pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Sedyo Makmur. KTH tersebut bertujuan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Namun, dalam praktiknya, KTH Sedyo Makmur menghadapi tiga persoalan utama; yaitu lemahnya sistem manajerial dan administrasi, kesulitan menjalin jejaring kerja sama, serta ketidakmampuan melakukan reboisasi terhadap lahan gundul.

Lemahnya sistem manajerial mencakup beberapa hal, yaitu perencanaan strategis yang belum matang, pengelolaan keuangan yang kurang transparan, serta dokumentasi kegiatan yang belum rapi. Kondisi tersebut menyebabkan sulitnya dalam menyusun program kerja yang berkelanjutan dan menghambat akses terhadap dukungan dari pihak eksternal. Persoalan kedua, yaitu keterbatasan kemampuan dalam menjalin jejaring kemitraan menyebabkan KTH Sedyo Makmur kesulitan untuk mengakses sumber daya penting seperti pelatihan, teknologi, dan bantuan teknis yang ditawarkan oleh pemerintah atau mitra swasta. Lalu persoalan ketiga adalah ketidakmampuan dalam melakukan reboisasi pada 115 hektare lahan gundul yang mereka kelola, hal tersebut mengancam keberlanjutan ekosistem hutan serta sumber penghidupan masyarakat anggota KTH.

Ketiga persoalan tersebut saling berkaitan dan menciptakan dampak yang sistemik. Lemahnya tata kelola internal menyebabkan hilangnya kepercayaan dari pihak eksternal, serta ketidakmampuan dalam menjalin jejaring yang semakin memperburuk akses terhadap bantuan teknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan lapangan. Maka dari itu, proses reboisasi yang seharusnya dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab ekologis dan ekonomi menjadi terhambat. Bila tidak segera ditangani, ketiga permasalahan ini dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi anggota KTH Sedyo Makmur juga mengancam keberlanjutan fungsi ekologis hutan yang mereka kelola. Potensi hutan sebagai sumber penghidupan jangka panjang akan semakin menurun, dan kualitas lingkungan di wilayah tersebut akan berdampak secara luas.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di KTH Sedyo Makmur dilakukan melalui pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif. Pendekatan partisipatif menekankan kepada keterlibatan aktif masyarakat dalam tahapan-tahapan kegiatan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwasannya program benar-benar sesuai dengan

kebutuhan. Lalu, pendekatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat, edukasi diberikan melalui pelatihan, penyuluhan, hingga praktik langsung. Sementara pendekatan kolaboratif menekankan pada keterlibatan kemitraan antar aktor, baik perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta.

Ketiga pendekatan tersebut akan difokuskan kepada dua aspek, yaitu edukasi serta pendampingan dalam penguatan kelembagaan melalui pelatihan dan pembibitan disertai pemberian 1000 bibit pohon. Adapun pelaksanaannya mengikuti metode yang terstruktur dan terintegrasi sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Edukasi dan Pendampingan Penguatan Kelembagaan KTH

a. Analisis Awal dan Identifikasi Kebutuhan

Mengadakan diskusi awal (*focus group discussion*) dengan pengurus dan anggota KTH yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025, hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan spesifik dalam pengelolaan administrasi, tata kelola organisasi, dan pembangunan jejaring.

b. Edukasi dan Pelatihan

Mengadakan pelatihan untuk pengurus dan anggota KTH yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2025. Pelatihan dilakukan secara langsung di lokasi (on-site) dengan metode: Pemaparan materi secara sederhana dan aplikatif. Dan latihan penyusunan dokumen administrasi, pembuatan proposal, dan simulasi berjejaring dengan mitra.

c. Pendampingan dan Monitoring

Mendampingi pengurus KTH dalam implementasi hasil pelatihan. Memberikan konsultasi terkait masalah yang dihadapi saat menjalankan administrasi atau membangun jejaring. Monitoring dilakukan melalui kunjungan berkala dan komunikasi daring untuk memastikan keberlanjutan program.

Penyediaan Bibit dan Bahan

UMY menyediakan 1000 bibit pohon yang terdiri dari 250 pohon mangga, 250 pohon sengon, 250 pohon mete, dan 250 pohon sirsak untuk mendukung reboisasi tahap awal. Penyerahan 1000 bibit pohon tersebut dilakukan secara simbolis kepada KTH, dilanjutkan dengan penanaman bibit di area prioritas sebagai bagian dari reboisasi tahap awal. Anggota KTH dilibatkan secara penuh dalam

proses penanaman untuk memastikan transfer pengetahuan berlangsung efektif. Selain itu kami akan melakukan pelatihan pembibitan seperti 1) pemilihan benih pohon berkualitas, dan 2) penyemaian, perawatan, dan pengendalian hama.

- Kolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY): UMY berperan sebagai fasilitator utama dalam penyediaan materi edukasi, bibit, dan pendampingan teknis.
- Partisipasi Anggota KTH: Anggota KTH dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan kebutuhan lokal.
- Kemitraan dengan Pihak Eksternal: Program ini juga membuka peluang kerja sama dengan pemerintah daerah, LSM, atau pihak swasta yang tertarik mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan Program ini Mencakup:

- Terbentuknya sistem administrasi dan tata kelola organisasi yang lebih baik di KTH Sedyo Makmur.
- Terciptanya jejaring kolaborasi antara KTH dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan NGO.
- Berhasilnya reboisasi tahap awal dengan tingkat kelangsungan hidup 1000 pohon baru.
- Tersedianya pembibitan mandiri yang mampu mendukung kebutuhan reboisasi jangka panjang.

Jadwal Kegiatan

Tabel 1. Jadwal kegiatan pengabdian

No.	Nama Kegiatan	Bulan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Melakukan Pra-Observasi	■												
2.	Pengajuan Proposal	■	■											
3.	Persiapan Pelaksanaan		■	■										
4.	Pelaksanaan Penanaman 1000 bibit				■									
5.	Evaluasi hasil penanaman					■	■	■	■					
6.	Penulisan Laporan									■	■	■	■	■
7.	Publikasi dan Dokumentasi											■	■	■

Tabel diatas merupakan jadwal kegiatan pengabdian masyarakat di KTH Sedyo Makmur Gunung Kidul. Kegiatan tersebut terbagi atas pra observasi yang dilakukan di bulan pertama. Tahap awal berupa kunjungan awal untuk mengidentifikasi kondisi Lokasi penanaman dan kebutuhan penanaman. Aktivitas ini penting sebagai dasar perencanaan kegiatan lanjutan. Selanjutnya pengajuan proposal di bulan pertama dan kedua. Setelah observasi awal, dilakukan penyusunan dan pengajuan proposal kegiatan kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, dan pendanaan. Kemudian persiapan pelaksanaan di bulan kedua dan ketiga. Kegiatan ini mencakup koordinasi dengan

masyarakat dan lembaga lokal, pengadaan bibit, logistik, serta penyiapan lahan yang akan digunakan untuk penanaman. Kegiatan pelaksanaan penanaman di bulan keempat. Pada tahap ini dilakukan penanaman 1.000 bibit. Setelah kegiatan penanaman dilakukan evaluasi hasil penanaman di bulan kelima dan keenam. Evaluasi dilakukan untuk memantau pertumbuhan bibit, tingkat keberhasilan penanaman, serta kendala-kendala yang muncul. Ini berguna untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Selanjutnya adalah penulisan laporan dibulan keenam, ketujuh dan kedelapan. Penyusunan laporan kegiatan, mencakup proses, hasil, capaian, serta analisis keberhasilan program sebagai bentuk pertanggungjawaban. Terakhir yakni publikasi serta dokumentasi di bulan kesembilan, kesepuluh, kesebelas dan duabelas. Hasil kegiatan didokumentasikan dan dipublikasikan melalui berbagai media untuk menyebarkan dampak dari kegiatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Peranan 1000 Bibit

Tim pengabdian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melakukan observasi lapangan di Kelompok Tani Hutan (KTH) Sedyo Makmur, yang berlokasi di Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini bertujuan untuk merencanakan serta mendiskusikan lebih lanjut terkait agenda penanaman 1.000 bibit pohon, sebagai bagian dari upaya reboisasi dan pelestarian lingkungan di kawasan tersebut. Tahap awal dalam perencanaan penanaman ini dimulai dengan survei lokasi. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan titik-titik tanam yang sesuai berdasarkan karakteristik tanah dan kondisi lahan di area KTH Sedyo Makmur. Analisis ini menjadi langkah krusial agar tanaman yang ditanam memiliki peluang tumbuh optimal dan dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan ekosistem setempat. Setelah survei lokasi selesai, tim pengabdian UMY mengadakan diskusi bersama anggota KTH untuk menyusun strategi penanaman yang efektif. Diskusi ini mencakup berbagai aspek teknis, seperti pemetaan lahan yang akan digunakan, pengaturan jarak tanam yang ideal agar tanaman dapat tumbuh dengan baik tanpa bersaing dalam hal nutrisi dan ruang, serta teknik pemeliharaan pasca-penanaman, termasuk metode penyiraman, pemupukan, dan perlindungan terhadap hama atau gangguan lingkungan lainnya.

Selain membahas aspek teknis penanaman, tim pengabdian UMY juga menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi bagi anggota KTH Sedyo Makmur. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya reboisasi dalam menjaga keseimbangan

ekosistem, mengurangi risiko erosi tanah, serta meningkatkan cadangan air tanah di wilayah tersebut. Lebih dari itu, tim juga menjelaskan potensi manfaat ekonomi jangka panjang yang dapat diperoleh dari kegiatan penghijauan ini, seperti hasil panen dari pohon yang ditanam, peningkatan kualitas tanah untuk pertanian, serta peluang ekonomi berbasis kehutanan yang dapat dikembangkan oleh masyarakat sekitar. Melalui serangkaian kegiatan ini, tim pengabdian UMY berharap program penanaman 1.000 bibit pohon di KTH Sedyo Makmur dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.



Gambar 1. Survei Lokasi Penanaman

Terlebih lagi dalam sesi sosialisasi ini tim pengabdian UMY juga menjelaskan berbagai potensi manfaat ekonomi jangka panjang yang dapat diperoleh oleh masyarakat melalui program penghijauan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Beberapa manfaat ekonomi yang diharapkan muncul dari kegiatan ini antara lain adalah hasil panen dari pohon yang ditanam, baik dalam bentuk hasil kayu maupun non-kayu seperti buah atau produk turunan lainnya yang memiliki nilai jual, serta peningkatan kualitas tanah yang akan berdampak positif terhadap produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Selain itu, tim juga menekankan adanya peluang ekonomi berbasis kehutanan yang dapat dikembangkan oleh masyarakat sekitar, seperti pemanfaatan lahan hutan yang telah direhabilitasi untuk ekowisata, budidaya tanaman obat, atau bahkan pengelolaan hasil hutan yang berkelanjutan guna mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Pengajuan Proposal 1000 Bibit

Untuk merealisasikan kegiatan penanaman 1000 bibit di KTH Sedyo Makmur, tim pengabdian UMY mengajukan proposal permohonan bibit kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Serayu Opak Progo. Proposal tersebut terdiri atas tujuan kegiatan, rencana kegiatan, jenis bibit serta jumlah bibit yang diusulkan agar sesuai dengan kondisi lahan yang ada di sekitar KTH. Selain itu proposal yang diajukan mencakup berbagai aspek penting yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Di dalamnya dijelaskan secara rinci mengenai tujuan utama program, yaitu untuk memperbaiki kondisi lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghijauan, serta memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Sedyo Makmur melalui pemanfaatan hasil tanaman di masa mendatang. Selain itu, proposal juga memuat rencana kegiatan yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca-penanaman guna memastikan keberhasilan program. Adapun untuk jenis dan jumlah bibit yang diajukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah dan jenis kebutuhan bibit

No.	Jenis bibit	Jumlah Kebutuhan
1	Bibit Pohon Mangga	250
2	Bibit Pohon Sengon	250
3	Bibit Jambu Mete	250
4	Bibit Pohon Sirsak	250
Jumlah Kebutuhan Bibit		1000

Setelah pengajuan proposal kepada BPDAS Serayu Opak Progo, tim menunggu persetujuan proposal tersebut. BPDAS akan meninjau kelayakan proposal berdasarkan kesesuaian tujuan program, kondisi lokasi penanaman, serta jenis dan jumlah bibit yang diajukan. Jika proposal memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka akan dilakukan koordinasi lebih lanjut mengenai mekanisme distribusi dan jadwal pengambilan bibit. Berdasarkan informasi, pengambilan bibit dapat diambil di Persemaian Permanen BPDAS SOP Gunungkidul dengan syarat menunjukkan surat pengantar pengambilan bibit yang telah dikeluarkan oleh BPDAS Serayu Opak Progo. Surat pengantar ini menjadi dokumen penting dalam proses pengambilan bibit karena berfungsi sebagai bentuk administrasi resmi yang memastikan bahwa distribusi bibit dilakukan secara tertib dan sesuai dengan kebijakan instansi.

Persiapan Pelaksanaan Penanaman 1000 Bibit

Persiapan pelaksanaan penanaman merupakan salah satu langkah awal dalam menentukan keberhasilan kegiatan. Dalam tahap ini, berbagai aspek perlu diperhatikan mulai dari kesiapan lahan, distribusi bibit hingga koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Langkah pertama adalah

memastikan lahan yang akan digunakan dalam kondisi siap tanam. Hal ini mencakup pemetaan titik-titik penanaman untuk memastikan distribusi bibit yang merata. Selain itu, jenis bibit yang akan ditanam harus disesuaikan dengan karakteristik lahan dan kondisi lingkungan setempat agar tumbuh dengan baik. Langkah ini diawali dengan diskusi bersama dengan anggota KTH Sedyo Makmur terkait lokasi penanaman, jenis dan jumlah bibit yang sesuai dengan kondisi lahan serta perencanaan agenda penanaman.



Gambar 2. Diskusi dengan Kelompok KTH Sedyo Makmur

Persiapan kedua yaitu pengambilan bibit. Pengambilan bibit sebanyak 1000 bibit dilakukan di Persemaian Permanen BPDAS SOP Gunungkidul. Prosedur pengambilan bibit dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Persemaian Permanen BPDAS SOP Gunungkidul. Sebelum pengambilan, dilakukan koordinasi dengan pihak persemaian untuk memastikan ketersediaan bibit serta jadwal yang telah disepakati. Selain itu, dokumen administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat pengantar pengambilan bibit harus dipersiapkan sebagai bagian dari prosedur resmi. Setibanya di lokasi persemaian, bibit yang akan diambil diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kualitas dan kelayakannya sebelum dibawa ke lokasi penanaman. Setelah pengambilan bibit sebanyak 1000 barulah mulai untuk mendistribusikannya ke KTH Sedyo Makmur.



Gambar 3: Pengambilan 1000 Bibit di Persemaian Permanen BPDAS SOP Gunungkidul

Dalam Persiapan selanjutnya yaitu pengantaran 1000 bibit ke lokasi sekaligus mempersiapkan kebutuhan acara penanaman. Bibit yang telah diambil dari Persemaian Permanen BPDAS SOP Gunungkidul kemudian diangkut menuju lokasi penanaman di KTH Sedyo Makmur. Proses pengantaran dilakukan menggunakan mobil pick-up dengan memperhatikan kondisi bibit agar tetap dalam keadaan baik selama perjalanan. Bibit disusun secara hati-hati di dalam kendaraan untuk menghindari kerusakan akibat gesekan atau tekanan berlebih. Setibanya di lokasi, bibit ditempatkan di area yang teduh dan terhindar dari risiko kerusakan hingga waktu penanaman tiba. Sementara itu, persiapan kebutuhan acara penanaman juga dilakukan, termasuk pemasangan banner kegiatan serta briefing dengan anggota dan ketua KTH Sedyo Makmur.



Gambar 4. Persiapan Kegiatan Penanaman 1000 Bibit di KTH Sedyo Makmur Gunungkidul

Pelaksanaan Penanaman

Pelaksanaan penanaman 1000 bibit di KTH Sedyo Makmur pada tanggal 22 Februari 2025 merupakan tahap utama dalam upaya reboisasi

yang bertujuan untuk memulihkan ekosistem hutan dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pada pelaksanaan penanaman dihadiri oleh Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat (MLH PP) Muhammadiyah, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Aisyiyah dan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UMY. Kehadiran berbagai lembaga ini menunjukkan adanya dukungan luas terhadap program penghijauan, sekaligus mencerminkan pentingnya sinergi antara organisasi masyarakat, akademisi, dan institusi lingkungan dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Kegiatan diawali dengan pembukaan yang mencakup menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sang Surya kemudian diikuti dengan sambutan dari Ketua KTH Sedyo Makmur, LPM UMY, MLHPP Muhammadiyah dan LLHPB Aisyiyah. Selanjutnya diikuti dengan penyerahan bibit pohon secara simbolis oleh ketua MLH PP Muhammadiyah, Kepala LPM UMY dan LLHPB Aisyiyah kepada ketua KTH Sedyo Makmur. Setelah proses simbolis, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman 1000 bibit bersama para anggota KTH Sedyo Makmur. Kegiatan penanaman dilakukan di lokasi yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan memastikan bahwa setiap bibit ditanam sesuai dengan teknik yang benar agar memiliki peluang tumbuh yang optimal. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak dalam acara ini tidak hanya terbatas pada proses penanaman, tetapi juga mencakup diskusi dan sosialisasi mengenai pentingnya konservasi lingkungan serta strategi jangka panjang untuk pemeliharaan bibit yang telah ditanam.



Gambar 5. Kegiatan Penanaman 1000 Bibit di KTH Sedyo Makmur Gunungkidul

D. PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan dari program pengabdian masyarakat di KTH Sedyo Makmur menunjukkan bahwa upaya reboisasi dan penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan langkah strategis dalam menjaga kelestarian hutan serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Program ini berhasil mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi KTH, seperti lemahnya manajemen organisasi, keterbatasan dalam menjalin jejaring kerja sama, serta ketidakmampuan dalam melakukan reboisasi setelah penebangan hutan. Melalui serangkaian kegiatan, termasuk edukasi tata kelola kelembagaan, pendampingan administrasi, serta penyediaan 1000 bibit pohon, program ini tidak hanya berkontribusi pada pemulihan ekosistem hutan, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Pelaksanaan penanaman yang melibatkan berbagai pihak, seperti Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, LLHPB Aisyiyah, dan LPM UMY, memperkuat kolaborasi antara akademisi, masyarakat, dan organisasi lingkungan dalam mendukung program penghijauan. Meskipun demikian, keberhasilan program ini bergantung pada keberlanjutan pasca-penanaman, khususnya dalam aspek pemeliharaan dan monitoring pertumbuhan bibit yang telah ditanam. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi yang berkelanjutan serta komitmen dari anggota KTH untuk memastikan bahwa hutan yang direhabilitasi dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik dari segi ekologi maupun ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat di KTH Sedyo Makmur, terdapat beberapa saran untuk memperkuat dampak dan keberlanjutan program yang telah diberikan. Pertama, KTH Sedyo Makmur perlu mendapatkan pelatihan lanjutan secara bertahap, seperti manajemen organisasi digital, penyusunan proposal hibah, dan kepemimpinan komunitas. Kedua, dibutuhkan penguatan kemitraan dengan Dinas Kehutanan, LSM, dan swasta melalui program CSR untuk mendukung sarana administrasi, media promosi, serta fasilitas pembibitan. Ketiga, reboisasi perlu didampingi secara teknis, terutama dalam enam bulan awal, termasuk penyulaman, pemupukan, dan pelatihan pemantauan pertumbuhan tanaman. Keempat, penting dibentuk tim kecil dalam KTH yang fokus pada kelembagaan, pembibitan, dan reboisasi, dengan tugas yang jelas melalui keputusan internal. Kelima, KTH dapat mulai menyusun rencana bisnis sederhana untuk pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti mangga, mete, dan sirsak, mencakup strategi panen berkelanjutan, pengolahan, pemasaran, dan legalitas produk. Dengan langkah-langkah ini, KTH Sedyo Makmur diharapkan tumbuh sebagai kelembagaan yang mandiri dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih diberikan kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam pengabdian di KTH Sedyo Makmur, yaitu kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat (MLHPP) Muhammadiyah, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Aisyiyah yang telah memberikan dukungan untuk kegiatan ini dari awal hingga akhir.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Purnama, D. H., & Sartika, D. D. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Tani: Proses Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Kibuk Dalam Tata Kelola Perhutanan Sosial di Kota Pagalaran. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(10), 1–23.
- Alule, J. R., Nuwategeka, E., & Oriangi, G. (2023). Characterisation of Forest Resources and the Local Communities for the Choice of Sustainable Forest Management Strategies in Uganda. *East African Journal of Forestry and Agroforestry*, 6(1), 186–199. <https://doi.org/10.37284/eajfa.6.1.1305>
- Annisa, W. R., & Zunariyah, S. (2018). PERUBAHAN POLA PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT DI DESA KALIGUNTING (Studi Kasus PHBM di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur). *Journal of Development and Social Change*, 1(1), 76. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i1.20744>
- Arba, & Sudiarto. (2023). Forest Protection and Its Role in Human Life and the Natural Environment. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2).
- Arifandy, M. I., & Sihaloho, M. (2016). Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(2). <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i2.11339>
- Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). What causes deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters*, 14(2). <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf6db>
- Gopal, S., Kelly-Fair, M., & Ma, Y. (2023). Palm Oil – The Increasing Materiality of Deforestation and Biodiversity Risks in

- Indonesia and Malaysia. *IGARSS 2023 - 2023 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium*, 2374–2377. <https://doi.org/10.1109/IGARSS52108.2023.10282181>
- Hendriyantore, R. (2018). Tata kelola internal dan eksternal untuk mengatasi permasalahan pangan di Indonesia. *Jurnal Good Governance*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.32834/gg.v13i1.26>
- Hifume, A. K., Arias, J. M., Anthony, O., Lipoles, P., Gempesao, M. C., Krista, A., Arias, J. M., Lipoles, O. A. P., & Gempesao, M. C. (2024). *Open Access TACKLING ILLEGAL LOGGING: PROBLEMS AND CHALLENGES*. 05, 81–94.
- Kiely, L., Spracklen, D. V., Arnold, S. R., Papargyropoulou, E., Conibear, L., Wiedinmyer, C., Knotte, C., & Adrianto, H. A. (2021). Assessing costs of Indonesian fires and the benefits of restoring peatland. *Nature Communications*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-27353->
- Kusin, K., Jagau, Y., Ricardo, J., Saman, T. N., & Aguswan, Y. (2020). Peat lost by fire in kalamangan area, central kalimantan, Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 862(2). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/504/1/012009>
- Lawrence, D., Radel, C., Tully, K., Schmoock, B., & Schneider, L. (2010). Untangling a decline in tropical forest resilience: Constraints on the sustainability of shifting cultivation across the globe. *Biotropica*, 42(1), 21–30. <https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2009.00599.x>
- Martapani, A. N., Fauzi, H., & Naparin, M. (2021). Dampak Hutan Kemasyarakatan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju, Kph Kayu Tangi). *Jurnal Rimba Lestari*, 1(1), 36–46. <https://doi.org/10.29303/rimbalestari.v1i1.387>
- Rahayu, E. I., Maryudi, A., & Subrata, S. A. (2018). A Systematic Protocol for Mapping Forest Governance Research in Indonesia. *AgEcon Search*, 18. file:///F:/Spec 2/Traffic Delay Model.pdf
- Sari, R. A., Devi, R., & Harahap, N. (2024). Peran Kebijakan Public Dalam Konservasi Sumber Daya Hutan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Sourokou, R., & Vodouhe, F. (2024). Local Perceptions of Forest-Based Ecosystem Services in Benin, West Africa. *American Journal of Agriculture and Forestry*, 12(2), 113–128. <https://doi.org/10.11648/j.ajaf.20241202.16>
- Talumepa, J. B. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tata Kelola Hutan Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(4), 25–35. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30907>
- Wisnu Rubiyanto, C., Julian Santosa, F., & Juwita, R. (2023). Motives for Community Involvement in Agricultural Practice in Forest Production Area: A Case study at Kesatuan Pemangkuan Hutan/Forest Management Unit Kebonharjo, Central Java. *E3S Web of Conferences*, 444(5). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344403018>